

## Strategi Tiongkok dalam Membendung Pengaruh Amerika Serikat di Kawasan Pasifik Selatan

Mohammad Arik Muwaffaq<sup>1</sup>, Syasya Yuania Fadila Mas'udi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246, Babatan, Tegalondo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

<sup>2</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246, Babatan, Tegalondo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144  
arikhmuwaffaq188@gmail.com; syasyamasudi@umm.ac.id

### ABSTRACT

*This study examines China's strategy to counterbalance the influence of the United States in the South Pacific through economic engagement, diplomatic initiatives, and emerging security cooperation. Using a qualitative descriptive method and the Balance of Power framework, the research analyzes how China's instruments such as the Belt and Road Initiative (BRI), development assistance, and limited security arrangements reshape the geopolitical landscape of the region. The findings reveal that China's growing presence has increased the economic dependence of South Pacific states, prompting the United States and Australia to respond through the Free and Open Indo-Pacific strategy, expanded development aid, and strengthened security partnerships. The study also finds that South Pacific states display three distinct response patterns: hedging, soft balancing, and asymmetric alignment, each driven by domestic needs and varying state capacities. Overall, the research concludes that power balancing in the South Pacific takes place primarily through non-military mechanisms and is heavily influenced by economic and political instruments rather than direct military confrontation*

**Keywords:** China, United States, South Pacific, geopolitics, balance of power

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis strategi Tiongkok dalam meredam pengaruh Amerika Serikat di kawasan Pasifik Selatan melalui instrumen ekonomi, diplomasi, dan keterlibatan keamanan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kerangka teori *Balance of Power*, penelitian ini menguraikan bagaimana inisiatif Tiongkok seperti *Belt and Road Initiative* (BRI), *chequebook diplomacy*, serta kerja sama keamanan terbatas mendorong perubahan dinamika geopolitik kawasan. Temuan menunjukkan bahwa strategi Tiongkok memperkuat ketergantungan ekonomi negara-negara Pasifik, sehingga memicu respons balancing dari Amerika Serikat dan Australia melalui FOIP, peningkatan bantuan pembangunan, dan kemitraan keamanan. Negara-negara Pasifik sendiri menunjukkan tiga pola respons: *hedging*, *soft balancing*, dan *asymmetric alignment*, yang dipengaruhi oleh kebutuhan pembangunan dan kapasitas domestik masing-masing. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyeimbangan kekuatan di Pasifik Selatan bersifat non-militer, berlapis, dan lebih ditentukan oleh instrumen ekonomi-politik daripada kompetisi militer langsung.

**Kata Kunci:** Tiongkok, Amerika Serikat, Pasifik Selatan, geopolitik, balance of power

### PENDAHULUAN

Pasifik Selatan merupakan kawasan strategis yang dihuni oleh negara-negara kepulauan kecil yang memiliki sumber daya terbatas namun berada pada jalur perdagangan internasional serta memiliki nilai penting bagi kepentingan militer dan keamanan. Kondisi ini membuat kawasan tersebut sejak lama menjadi arena kompetisi kekuatan besar, terutama ketika dinamika geopolitik global menguat pasca berakhirnya Perang Dingin (Wallis, 2017). Dalam dua dekade terakhir, rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat menjadikan Pasifik

Selatan sebagai salah satu titik penting dalam percaturan geopolitik Indo-Pasifik (Shepard, 2009).

Sejak berakhirnya Perang Dingin, Tiongkok meningkatkan keterlibatannya melalui bantuan ekonomi, investasi infrastruktur, serta kerja sama pembangunan dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Peningkatan bantuan tersebut menjadikan Tiongkok sebagai salah satu donor terbesar di kawasan, hingga disebut sebagai “banker baru” karena penggunaan pinjaman jangka panjang sebagai instrumen diplomasi ekonomi (Hanson, 2011). Sementara itu, Australia sebagai kekuatan tradisional kawasan tetap mempertahankan kepentingan strategisnya melalui bantuan luar negeri dan kerja sama pembangunan, ditambah faktor geografis dan kapasitas militernya sebagai negara terbesar di Pasifik Selatan (Hayward-Jones, 2015).

Kebangkitan pengaruh Tiongkok mendorong Amerika Serikat untuk kembali memperkuat keterlibatannya di kawasan. Hal ini terlihat melalui peluncuran konsep *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) pada tahun 2017 yang menegaskan orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas serta menahan ekspansi Tiongkok di kawasan (Trump, 2017). Selain itu, revitalisasi *Quadrilateral Security Dialogue* (Quad) menjadi bagian dari strategi Amerika Serikat untuk menyeimbangkan kekuatan Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik (CFR, 2021).

Transformasi ekonomi Tiongkok sejak era reformasi Deng Xiaoping—melalui modernisasi industri, pertahanan, pertanian, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penerapan *Socialist Market Economy*, memberikan kemampuan finansial dan politik bagi Tiongkok untuk memperluas pengaruh internasional, termasuk di Pasifik Selatan (Garnaut, Song & Fang, 2018). Kekuatan ekonomi ini kemudian menjadi alat diplomasi yang memperkuat posisi Tiongkok dalam hubungan luar negeri di kawasan.

Perkembangan intensitas keterlibatan Tiongkok, diiringi dengan respon Amerika Serikat dan Australia, menciptakan dinamika baru dalam struktur kekuatan di Pasifik Selatan. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana negara-negara di kawasan menavigasi tekanan geopolitik serta bagaimana mekanisme balance of power terbentuk sebagai respons terhadap perubahan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan diri pada hubungan antara strategi Tiongkok dengan pola penyeimbangan kekuatan yang muncul di kawasan Pasifik Selatan.

Sejumlah penelitian telah membahas meningkatnya keterlibatan Tiongkok di Pasifik Selatan melalui investasi BRI, bantuan ekonomi, dan diplomasi budaya. Namun, sebagian besar kajian tersebut hanya bersifat deskriptif dan belum menganalisis bagaimana strategi Tiongkok tersebut berhubungan langsung dengan mekanisme *Balance of Power* di kawasan. Selain itu, respons Amerika Serikat dan negara-negara Pasifik sering dibahas secara terpisah, bukan sebagai bagian dari proses penyeimbangan kekuatan yang saling terkait. Maka dari itu, masih terdapat celah penelitian untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana strategi Tiongkok memicu perubahan dinamika kekuatan regional serta bagaimana aktor lain menyeimbangkan pengaruh tersebut.

Berdasarkan celah penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini berusaha memahami bagaimana Tiongkok menjalankan berbagai strateginya di Pasifik Selatan, termasuk pembangunan melalui BRI, pemberian bantuan dan pinjaman jangka panjang yang sering disebut sebagai *chequebook diplomacy* atau strategi menawarkan bantuan finansial untuk mendapatkan dukungan, serta berbagai pendekatan diplomasi yang lebih lunak untuk memperkuat pengaruhnya. Penelitian ini juga ingin melihat bagaimana Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara kepulauan Pasifik merespons langkah Tiongkok tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan hubungan antara strategi Tiongkok dan

reaksi negara-negara lain, serta memahami pola penyeimbangan kekuatan yang muncul di kawasan tersebut. Selain memberi gambaran yang komprehensif mengenai dinamika hubungan Tiongkok dengan negara-negara di Pasifik Selatan, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan dalam melihat dampak dari meningkatnya pengaruh Tiongkok dan membantu negara-negara di kawasan mengambil langkah yang lebih tepat dalam menghadapi perubahan geopolitik di wilayah mereka.

Istilah membendung pada judul penelitian ini tidak diartikan sebagai tindakan yang defensif maupun proaktif, melainkan sebagai upaya Tiongkok dalam memperluas dan mempertegas pengaruhnya di kawasan pasifik selatan dengan menggunakan instrumen ekonomi dan diplomasi, dan secara bertahap kemudian menggeser dominasi lama serta memicu dinamika penyeimbangan kekuatan dikawasan.

## **TINJAUAN PUSTAKA (Research Article)**

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur terdahulu yang relevan sebagai referensi dalam penulisan artikel ini. Berikut adalah beberapa rujukan yang digunakan oleh penulis :

### **1. Strategi dan Kepentingan Tiongkok di Pasifik Selatan**

Sejumlah penelitian menyoroti bahwa Tiongkok meningkatkan keterlibatannya di Pasifik Selatan melalui kombinasi bantuan ekonomi, investasi infrastruktur, serta diplomasi politik. Burhanudin (2015) menjelaskan bahwa kawasan Pasifik Selatan memiliki nilai strategis karena terdiri dari negara-negara kecil yang bergantung pada bantuan luar, sehingga rentan terhadap penetrasi kekuatan besar. Dalam konteks tersebut, Tiongkok memanfaatkan proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), bantuan hibah, dan pinjaman jangka panjang sebagai sarana memperluas pengaruhnya. Studi terbaru seperti Zhang (2021) menunjukkan bahwa Tiongkok menggunakan pendekatan pragmatis dan fleksibel dalam memberikan bantuan pembangunan, sehingga menjadi daya tarik bagi negara-negara Pasifik yang membutuhkan infrastruktur. Selain itu, laporan Lowy Institute (2022) menegaskan bahwa Tiongkok juga memakai instrumen diplomasi budaya, pendidikan, dan kerja sama masyarakat sebagai bagian dari strategi *soft power*. Kombinasi instrumen ekonomi dan diplomasi ini sering dipahami sebagai bentuk *chequebook diplomacy*, yaitu pemberian insentif ekonomi untuk mendapatkan dukungan politik dari negara-negara kecil.

### **2. Respons Amerika Serikat dan Australia terhadap Kebangkitan Tiongkok**

Penelitian tentang kebijakan Amerika Serikat menunjukkan bahwa keterlibatan Tiongkok memicu reorientasi strategi AS di Indo Pasifik. Khan dan Prasetyono (2022) menggambarkan kebangkitan Tiongkok sebagai ancaman utama yang mendorong revitalisasi kerja sama keamanan, termasuk Quad, sebagai instrumen penyeimbang regional. Kebijakan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) juga dipahami sebagai upaya AS untuk mempertahankan posisi strategis serta membatasi pengaruh Tiongkok di kawasan (Swaine, 2018). Australia, sebagai aktor tradisional di Pasifik, turut memperkuat program bantuan pembangunan, kemitraan keamanan, serta diplomasi regional guna mempertahankan pengaruh historisnya (Wallis, 2017; Australian Strategic Policy Institute, 2021). Literatur terkini menekankan bahwa respons AS dan Australia dapat dipahami sebagai bentuk soft balancing, yaitu upaya menahan ekspansi Tiongkok melalui aliansi dan kerja sama strategis.

### **3. Dinamika Kawasan Pasifik Selatan dan Variasi Respons Negara-Negara Pasifik**

Kajian kawasan menunjukkan bahwa negara-negara Pasifik Selatan tidak merespons kebangkitan Tiongkok secara seragam. Vinsensio (2015) menjelaskan bahwa faktor ekonomi domestik dan keterbatasan kapasitas negara-negara kecil membuat mereka cenderung

pragmatis dalam memilih mitra pembangunan. Beberapa negara seperti Fiji dan Papua Nugini melakukan *hedging*, yaitu mengambil keuntungan dari kedua kekuatan besar tanpa berpihak penuh (Dornan & Pryke, 2020). Sementara itu, Kepulauan Solomon menunjukkan kecenderungan bandwagoning dengan mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok pada tahun 2019, sebagaimana dicatat Zhang (2021). Literatur ini menegaskan bahwa dinamika internal negara-negara Pasifik memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan luar negeri mereka. Namun, sebagian besar kajian masih bersifat deskriptif dan belum menjelaskan secara mendalam keterkaitan antara pilihan negara-negara Pasifik tersebut dengan kompetisi strategis antara Tiongkok, Amerika Serikat, dan Australia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*), meliputi buku, jurnal ilmiah, skripsi, surat kabar, serta sumber elektronik. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dinamika hubungan internasional di kawasan Pasifik Selatan, khususnya interaksi antara Tiongkok, Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara Pasifik Selatan dalam kerangka *Balance of Power*. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan disusun sesuai dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Adapun batasan penelitian difokuskan pada negara-negara Pasifik Selatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan dinamika Tiongkok–AS–Australia, dengan periode analisis pada tahun 2010–2024.

## KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini menggunakan teori *Balance of Power* sebagai landasan analisis. Teori *Balance of Power* (BoP) menjelaskan bahwa negara akan berupaya mencegah dominasi satu kekuatan besar dengan meningkatkan kapabilitasnya atau mencari aliansi strategis. Dalam teori ini, keseimbangan dianggap sebagai kondisi alami dalam sistem internasional, karena negara bertindak untuk menjaga kelangsungan kepentingan dan keamanannya (Waltz, 1979). Dalam konteks kontemporer, BoP tidak hanya berbentuk kekuatan militer, tetapi juga mencakup ekonomi, diplomasi, bantuan pembangunan, dan kerja sama keamanan regional (Mearsheimer, 2001).

Selain relevan bagi negara besar, teori ini juga penting untuk memahami perilaku negara kecil. Negara kecil umumnya memiliki keterbatasan sumber daya dan kapabilitas militer, sehingga strategi mereka cenderung lebih fleksibel. Paul (2004) menjelaskan bahwa negara kecil dapat menggunakan soft balancing, yaitu upaya menahan pengaruh negara besar melalui kerja sama diplomatik atau ekonomi tanpa konfrontasi militer langsung. Sementara itu, hedging merujuk pada strategi menjaga hubungan baik dengan dua pihak yang bersaing untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan keuntungan (He, 2020).

Dalam kerangka teori BoP, terdapat pula konsep penting yaitu *bandwagoning*. *Bandwagoning* adalah strategi ketika negara justru memilih untuk mendekat atau bersekutu dengan kekuatan yang lebih dominan demi mendapatkan keuntungan material atau perlindungan politik (Walt, 1987). Pada negara-negara kecil, *bandwagoning* sering terjadi ketika kemampuan mereka untuk menyeimbangkan sangat terbatas. Contoh dalam konteks Pasifik Selatan adalah ketika negara seperti Kepulauan Solomon memperkuat hubungan dengan Tiongkok melalui pengalihan pengakuan diplomatik dari Taiwan pada tahun 2019.

Kerangka teori ini relevan dalam menjelaskan dinamika kawasan Pasifik Selatan, di mana kebangkitan Tiongkok melalui investasi BRI, bantuan ekonomi, dan diplomasi budaya memicu

respons *balancing* dari Amerika Serikat dan Australia. Pada saat yang sama, negara-negara kecil seperti Fiji, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon menunjukkan variasi strategi, ada yang melakukan *hedging*, *soft balancing*, maupun *bandwagoning*, sesuai kepentingan domestik dan kebutuhan pembangunan mereka. Dengan demikian, teori *Balance of Power* memberikan landasan analitis untuk memahami bagaimana persaingan kekuatan besar membentuk pilihan kebijakan negara-negara kecil di kawasan tersebut.

Dalam konteks negara-negara kecil, mekanisme *Balance of Power* tidak selalu berbentuk aliansi militer seperti model klasik. Literasi kontemporer menunjukkan bahwa negara kecil lebih sering menggunakan mekanisme seperti *soft balancing*, *hedging*, dan *asymmetric alignment* (Acharya, 2020; He, 2021). Ketiga mekanisme ini pada dasarnya merupakan adaptasi dari konsep penyeimbangan kekuatan, tetapi dilakukan dengan cara non-militer, melalui ekonomi, diplomasi, dan kemitraan fleksibel. Mekanisme inilah yang banyak terlihat dalam perilaku negara-negara Pasifik Selatan ketika merespons persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

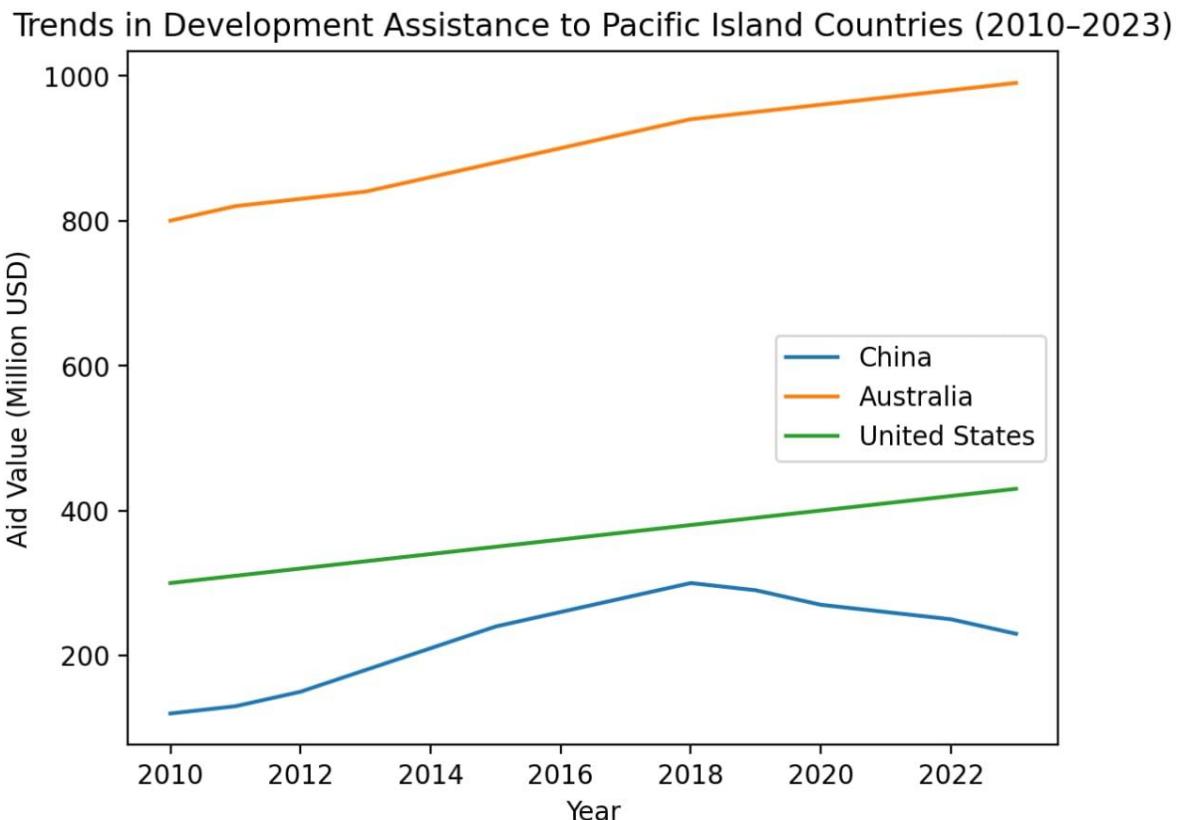
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peningkatan Keterlibatan Ekonomi Tiongkok di Kawasan Pasifik Selatan

Keterlibatan Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan meningkat signifikan setelah berakhirnya Perang Dingin, yang ditunjukkan melalui bantuan ekonomi, pinjaman infrastruktur, dan diplomasi politik yang semakin intensif (Zhang, 2023). Bantuan hibah dan pinjaman jangka panjang menjadi instrumen utama Beijing karena dianggap cepat, fleksibel, dan minim syarat politik, sehingga diminati negara-negara kecil Pasifik dengan kapasitas fiskal terbatas (Shie, 2018). Hal ini memperlihatkan bahwa instrumen ekonomi menjadi alat efektif bagi Tiongkok untuk memperluas pengaruh geopolitiknya di kawasan.

Sejak awal tahun 2010, Tiongkok secara bertahap meningkatkan keterlibatan ekonominya di kawasan Pasifik Selatan dengan memanfaatkan bantuan pembangunan dan proyek infrastruktur sebagai instrumen utama. Berdasarkan data pada Pacific Aid Map yang dirilis Lowy Institute, nilai bantuan dan pembiayaan pembangunan Tiongkok di kawasan ini mencapai ratusan juta hingga miliaran dolar Amerika Serikat dalam kurun waktu 2008–2023, hal itu menjadikan salah satu donor bilateral paling signifikan setelah Australia. Keterlibatan tersebut tidak hanya terbatas pada pernyataan atau komitmen di atas kertas, melainkan diwujudkan melalui berbagai proyek nyata, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Fiji serta dukungan anggaran langsung kepada Kepulauan Solomon. Pola ini menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi Tiongkok di Pasifik Selatan tidak hanya itu, melainkan terintegrasi dengan upaya memperluas pengaruh diplomatik dan politiknya di kawasan, sejalan dengan praktik economic statecraft yang bertujuan membentuk sikap negara mitra tanpa menggunakan tekanan militer secara langsung.

Untuk peningkatan keterlibatan ekonomi Tiongkok di Pasifik Selatan dapat dilihat melalui data yang diambil dari *Pacific Aid Map 2025*.



(sumber : Lowy Institute. Pacific Aid Map 2025 Key Findings.  
<https://pacificaidmap.lowyinstitute.org/analysis/2025/key-findings/>)

Gambar diatas menunjukkan bahwa Australia tetap berada di nomor 1 donor bantuan utama di Pasifik Selatan sepanjang periode pengamatan. Di sisi lain, bantuan Tiongkok meningkat sejak awal dekade 2010 an, meskipun pada beberapa tahun terakhir cenderung menurun. Sementara itu, bantuan Amerika Serikat relatif stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan. Pola ini memperlihatkan bahwa peran ekonomi Tiongkok di kawasan berkembang secara bertahap dan menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika regional.

Selain memanfaatkan kekuatan ekonomi, Tiongkok juga memanfaatkan *soft power* melalui pertukaran pelajar, program budaya, dan pembangunan fasilitas publik, termasuk melalui keberadaan Confucius Institute di beberapa negara Pasifik (Sape, 2022). Strategi ini mencerminkan pola *chequebook diplomacy*, yaitu pemberian insentif ekonomi untuk mendapatkan dukungan politik, terutama terkait isu sensitif seperti pengakuan terhadap Taiwan (Zhang, 2022).

Peran *Belt and Road Initiative* (BRI) menjadi pilar penting dalam strategi ekspansi Tiongkok. Melalui proyek-proyek infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan fasilitas energi, Tiongkok memperluas keterlibatan ekonomi secara sistematis di Pasifik Selatan (Azis & Pratama, 2023). Meski proyek ini memberi manfaat pembangunan, beberapa negara di Asia seperti Sri Lanka dan Laos menjadi contoh risiko ketergantungan utang yang dapat muncul akibat BRI (Jones & Hameiri, 2020). Dalam konteks *Balance of Power*, ekspansi Tiongkok ini merupakan usaha untuk memperkuat posisi strategisnya di kawasan yang sebelumnya didominasi Amerika Serikat dan Australia.

Selain instrumen ekonomi dan *soft power*, Tiongkok juga mulai memperluas *security engagement*, yaitu bentuk kerja sama keamanan non-militer seperti bantuan kepolisian, pelatihan keamanan, atau pengiriman personel keamanan untuk membantu stabilitas negara

mitra. Contohnya, kerja sama keamanan antara Tiongkok dan Kepulauan Solomon pada 2022 memunculkan kekhawatiran internasional karena memungkinkan pengerahan pasukan keamanan Tiongkok untuk mengatasi kerusuhan domestik (Zhang, 2023). Walaupun tidak secara eksplisit berbentuk pangkalan militer, langkah ini dianggap sebagai upaya Tiongkok untuk memperluas ruang gerak dan pengaruh strategisnya secara bertahap di kawasan Pasifik Selatan.

BRI juga digunakan sebagai sarana untuk memperdalam ketergantungan ekonomi negara-negara Pasifik terhadap Tiongkok. Di Melanesia, Papua Nugini menjadi salah satu penerima terbesar investasi Tiongkok untuk pembangunan infrastruktur, termasuk proyek jalan raya dan fasilitas pelabuhan (Azis & Pratama, 2023). Ketergantungan ini menciptakan hubungan yang tidak seimbang, karena Tiongkok memiliki kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar. Akibatnya, posisi tawar negara-negara Pasifik menjadi lebih lemah ketika bernegosiasi, meskipun mereka tetap menerima manfaat pembangunan dari proyek tersebut.

Di banyak kasus, strategi Tiongkok di Pasifik Selatan mencerminkan pola “*economic statecraft*”, yaitu pemanfaatan kekuatan ekonomi untuk mempengaruhi sikap dan keputusan negara lain pada isu-isu yang sangat strategis, termasuk kebijakan maritim, dukungan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pengakuan terhadap kebijakan *One China* (He, 2020). Strategi ini membuat Tiongkok bukan hanya aktor ekonomi, tetapi juga aktor geopolitik utama di kawasan.

## **2. Respons Amerika Serikat dan Australia terhadap Kebangkitan Tiongkok Di kawasan Pasifik Selatan**

Peningkatan aktivitas Tiongkok di Pasifik Selatan memicu reorientasi strategi Amerika Serikat dalam kerangka *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP), yang diarahkan untuk menahan ekspansi pengaruh Beijing melalui penguatan kerja sama keamanan, diplomasi, dan komitmen pembangunan (Swaine, 2018). FOIP secara jelas menempatkan Pasifik sebagai bagian penting dari upaya Amerika Serikat menjaga tatanan regional berbasis aturan.

Australia, sebagai kekuatan tradisional di Pasifik Selatan, memperkuat kebijakan *Pacific Step-Up* dengan meningkatkan bantuan pembangunan, kerja sama keamanan, dan hubungan politik untuk menjaga stabilitas kawasan serta mengimbangi ekspansi Tiongkok (ASPI, 2021). Pemerintah Australia memandang peningkatan investasi dan aktivitas politik Tiongkok sebagai ancaman terhadap pengaruh yang selama ini dimiliki di kawasan Pasifik Selatan (Wallis, 2017).

Dalam kerangka *Balance of Power*, respons Amerika Serikat dan Australia dapat dipahami sebagai bentuk soft balancing, yaitu upaya menahan ekspansi pengaruh Tiongkok melalui koalisi strategis dan peningkatan keterlibatan regional (He, 2020). Kebijakan FOIP, revitalisasi Quad, serta peningkatan bantuan ekonomi merupakan bagian dari strategi tersebut.

Selain FOIP, Amerika Serikat memperkuat mekanisme hard balancing melalui revitalisasi Quad dan pembentukan AUKUS. Kedua mekanisme ini bukan hanya memperkuat kapabilitas militer di kawasan, tetapi juga menjadi sinyal strategis bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Tiongkok mendominasi Indo-Pasifik (Swaine, 2018). Dengan meningkatnya pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan, AUKUS bekerja sebagai *deterrence architecture* untuk menjaga stabilitas kawasan dan mencegah perubahan status quo. Dalam konteks Pasifik Selatan ini, respon Amerika dan Australia sendiri lebih menonjolkan melalui pendekatan non militer, sedangkan hard balancing seperti AUKUS ini beroperasi dalam skala yang lebih luas seperti Indo Pasifik.

Australia juga merespons peningkatan pengaruh Tiongkok dengan memperbesar komitmen pendanaannya melalui kebijakan *Pacific Step Up*. Pendanaan ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan tata kelola,

keamanan maritim, dan ketahanan iklim (ASPI, 2021). Australia memandang kehadiran Tiongkok sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas kawasan, terutama karena sebagian besar negara Melanesia memiliki hubungan historis yang kuat dengan Canberra.

Selain itu, Amerika Serikat meningkatkan frekuensi kunjungan diplomatik tingkat tinggi ke negara-negara Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon, Fiji, dan Papua Nugini. Langkah ini merupakan simbol bahwa Amerika Serikat ingin memperkuat kembali hubungan yang sempat melemah pada dekade sebelumnya (Smith, 2019). Dalam konteks *Balance of Power*, upaya ini dapat dibaca sebagai strategi untuk mempertahankan posisi strategisnya Amerika Serikat di kawasan.

Secara keseluruhan respons Amerika Serikat dan Australia terhadap meningkatnya pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan tidak ditunjukkan melalui konfrontasi militer secara langsung. Kedua negara justru memilih memperkuat pendekatan ekonomi, diplomasi, serta kerja sama keamanan dalam skala terbatas dengan negara-negara kawasan. Pola kebijakan ini dapat dipahami sebagai bentuk *soft balancing*, yaitu upaya mempertahankan pengaruh strategis tanpa membentuk aliansi militer yang bersifat konfrontatif. Melalui pendekatan non militer tersebut, Amerika Serikat dan Australia berusaha membatasi perluasan pengaruh Tiongkok secara bertahap di tengah persaingan kekuatan besar di Pasifik Selatan (ASPI, 2021).

### **3. Respons Negara-Negara Pasifik Selatan terhadap persaingan Tiongkok dan Amerika Serikat**

Berbeda dengan Amerika Serikat dan Australia sebagai kekuatan besar, negara-negara Pasifik Selatan justru menghadapi dinamika ini dengan lebih pragmatis, karena negara di kawasan Pasifik Selatan ini cenderung memiliki keterbatasan kapasitas ekonomi dan keamanan.

Negara-negara Pasifik Selatan tidak menunjukkan respons yang seragam terhadap kebangkitan Tiongkok. Beberapa negara seperti Papua Nugini dan Fiji menerapkan strategi *hedging*, yaitu memanfaatkan keuntungan dari Tiongkok dan Amerika Serikat tanpa berpihak penuh pada salah satu pihak (Dornan & Pryke, 2020). Strategi ini memungkinkan negara-negara tersebut mempertahankan fleksibilitas diplomatik dan memperoleh sumber daya pembangunan dari dua kekuatan besar.

Dalam menghadapi meningkatnya persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat, negara-negara Pasifik Selatan menunjukkan respons yang beragam sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing. Kepulauan Solomon cenderung mempererat hubungan dengan Tiongkok melalui kerja sama ekonomi dan keamanan, dimana hal itu mencerminkan pola bandwagoning untuk memperoleh dukungan pembangunan dan penguatan kapasitas domestik. Sementara itu, negara seperti Papua Nugini dan Fiji lebih memilih strategi hedging dengan menjalin kerja sama ekonomi bersama Tiongkok, namun tetap mempertahankan hubungan politik dan keamanan dengan Australia serta Amerika Serikat. Perbedaan strategi ini menunjukkan sikap pragmatis negara-negara Pasifik Selatan dalam menyikapi persaingan kekuatan besar di kawasan. (Dornan & Pryke, 2020).

Kemudian seperti negara Palau, Marshall Islands, dan Samoa lebih condong kepada Amerika Serikat sehingga menunjukkan pola *asymmetric alignment*. Gampangnya pola tersebut mengartikan bahwa negara kecil menempel negara besar, tentunya tidak setara tetapi tujuan nya untuk mencari perlindungan kepada negara besar.

Variasi respon ini menunjukkan bahwa negara-negara Pasifik bukan aktor pasif, melainkan aktor strategis yang memanfaatkan kompetisi kekuatan besar untuk memperoleh manfaat pembangunan domestik (Dornan & Pryke, 2020). Selain itu keberagaman respon ini juga

dapat menimbulkan perpecahan politik regional apabila negara-negara terpolarisasi antara blok yang condong ke Tiongkok ataupun Amerika Serikat.

Perbedaan kepentingan ini kemudian menghasilkan pola yang berbeda-beda di setiap sub kawasan, sebagai contoh Melanesia menjadi sub kawasan yang paling dinamis dalam merespons kebangkitan Tiongkok. Negara-negara seperti Fiji dan Papua Nugini menggunakan strategi hedging untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari Tiongkok sambil tetap mempertahankan hubungan keamanan dengan Australia dan Amerika Serikat (Dornan & Pryke, 2020). Melanesia memiliki kepentingan pembangunan yang lebih besar dibanding Polinesia atau Mikronesia, sehingga lebih rentan terhadap masuknya bantuan ekonomi Tiongkok.

Negara-negara seperti Kepulauan Solomon dan Kiribati memilih untuk merapat ke Tiongkok karena mereka menilai Beijing mampu menawarkan manfaat ekonomi yang cepat dan nyata, seperti bantuan pembangunan dan investasi infrastruktur (Zhang, 2022). Sikap ini pada dasarnya menunjukkan bahwa kedua negara tersebut cenderung mengikuti dan mendukung kekuatan yang lebih besar demi keuntungan langsung. Namun, pilihan ini menimbulkan kekhawatiran di dalam negeri maupun di kawasan, terutama terkait potensi perluasan pengaruh politik dan keamanan Tiongkok melalui hubungan tersebut.

Sebaliknya, negara-negara di Polinesia dan Mikronesia cenderung lebih berhati-hati. Marshall Islands dan Palau tetap mempertahankan hubungan erat dengan Amerika Serikat karena keberadaan *Compact of Free Association* (COFA), yang memberikan jaminan keamanan dan akses ekonomi yang stabil (USIP, 2022). Perbedaan respons antar sub regional ini memperlihatkan bahwa negara-negara Pasifik tidak homogen, dan pilihan kebijakan luar negeri mereka sangat dipengaruhi oleh faktor struktural domestik masing-masing.

#### **4. Mekanisme *Balance of Power* dalam Kompetisi Tiongkok dan Amerika Serikat di Kawasan Pasifik Selatan**

Dinamika antara strategi Tiongkok, respon AS dan Australia, serta pilihan negara-negara Pasifik mencerminkan mekanisme *Balance of Power* yang semakin kompleks. Tiongkok memperluas pengaruh melalui *power projection* berbasis ekonomi dan infrastruktur, sementara Amerika Serikat dan Australia menggunakan aliansi keamanan dan diplomasi bantuan untuk menahan ekspansi tersebut (He, 2020).

Negara-negara Pasifik memainkan peran penting dalam proses penyeimbangan kekuatan melalui strategi *hedging* dan *soft balancing*, terutama karena keterbatasan kapasitas militer dan ketergantungan mereka pada bantuan pembangunan (Dornan & Pryke, 2020). Kombinasi interdependensi ekonomi, kompetisi geopolitik, dan kebutuhan domestik membuat mekanisme *Balance of Power* di kawasan ini tidak berjalan secara tradisional, tetapi melalui interaksi yang lebih fleksibel dan pragmatis.

Dengan demikian, Pasifik Selatan menjadi arena penting dalam kompetisi geopolitik Asia Pasifik, di mana struktur kekuatan regional sedang berubah akibat ekspansi Tiongkok dan respons defensif dari Amerika Serikat serta Australia (Zhang, 2022).

Dinamika *Balance of Power* di Pasifik Selatan tidak berlangsung seperti model tradisional Eropa yang berfokus pada kekuatan militer. Di kawasan ini, pola yang muncul lebih bersifat *soft balancing*, yaitu upaya negara-negara kecil menahan dominasi satu kekuatan besar dengan meningkatkan kerja sama dengan pihak lain tanpa masuk ke aliansi militer formal (Acharya, 2020). Banyak negara Pasifik juga melakukan *hedging*, yakni bersikap di tengah: "menerima bantuan ekonomi dari Tiongkok, tetapi tetap menjaga hubungan keamanan dengan Amerika Serikat agar tidak terlalu bergantung pada satu pihak" (He, 2021). Dalam beberapa kasus terlihat pula *asymmetric alignment*, ketika negara kecil menjalin kedekatan

dengan kekuatan besar untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang tidak dapat mereka penuhi sendiri (He, 2021). Dengan kata lain, negara-negara Pasifik memanfaatkan persaingan antara Tiongkok dan AS untuk memperoleh keuntungan pembangunan, sambil menghindari risiko kehilangan otonomi politik.

Dalam konteks ini, negara-negara Pasifik cenderung menghindari konfrontasi langsung dan lebih memilih strategi yang memungkinkan mereka tetap fleksibel. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme *Balance of Power* yang bekerja di Pasifik bersifat “non-konvensional”, karena negara kecil memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan arah stabilitas regional dibandingkan hanya menjadi objek dari kompetisi kekuatan besar (Dornan & Pryke, 2020).

Selain itu, perkembangan geopolitik menunjukkan bahwa Tiongkok dan Amerika Serikat kini memasuki fase kompetisi jangka panjang di kawasan ini. Persaingan ini tidak hanya berdampak pada kebijakan luar negeri negara-negara Pasifik, tetapi juga mengubah struktur geopolitik Asia Pasifik secara keseluruhan (Zhang, 2023). Dengan demikian, Pasifik Selatan berperan sebagai arena strategis yang menggambarkan pergeseran kekuatan global menuju pola multipolar.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas bahwa meningkatnya keterlibatan Tiongkok di Pasifik Selatan bukan hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga merupakan strategi geopolitik untuk memperluas pengaruh melalui bantuan, investasi, dan diplomasi budaya. Melalui *Belt and Road Initiative* (BRI), Tiongkok berhasil membangun ketergantungan ekonomi baru di beberapa negara Pasifik Selatan dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan yang mampu menantang dominasi lama Amerika Serikat dan Australia. Langkah ini menunjukkan bentuk perluasan pengaruh strategis secara non militer.

Kemudian Amerika Serikat dan Australia merespons ekspansi Tiongkok dengan memperkuat mekanisme kerja sama keamanan seperti FOIP, Quad, dan AUKUS, serta menambah bantuan pembangunan melalui *Pacific Step Up*. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya *balancing* untuk mempertahankan posisi strategis mereka dan mencegah perubahan keseimbangan kekuatan di kawasan. Disisi lain, negara-negara Pasifik Selatan tidak menunjukkan respon yang serentak. Mereka menunjukkan respon yang beragam, mulai dari *hedging*, *soft balancing*, hingga *bandwagoning*, sesuai kebutuhan ekonomi, kondisi domestik, dan orientasi politik masing-masing, nah dari beberapa kawasan yang ada di Pasifik Selatan, kawasan Melanesia menjadi kawasan yang paling dinamis.

Dinamika ini memperlihatkan bahwa mekanisme *Balance of Power* di Pasifik Selatan tidak beroperasi secara tradisional, tetapi melalui interaksi ekonomi, politik, dan diplomasi yang lebih fleksibel. Persaingan dua kekuatan besar, ditambah peran aktif negara-negara Pasifik, menjadikan kawasan ini wilayah penting dalam perubahan struktur geopolitik Indo-Pasifik menuju pola yang lebih multipolar.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran. Pertama, negara-negara Pasifik Selatan perlu memperkuat kapasitas diplomasi dan tata kelola agar dapat memanfaatkan peluang dari dua kekuatan besar tanpa terjebak dalam ketergantungan politik maupun ekonomi. Strategi hedging dapat menjadi pilihan untuk menjaga fleksibilitas dan otonomi kebijakan luar negeri. Kedua, Amerika Serikat dan Australia perlu meningkatkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan lokal negara-negara Pasifik, terutama terkait pembangunan ekonomi, adaptasi iklim, dan penguatan institusi, agar upaya balancing mereka tidak hanya berfokus pada aspek keamanan. Ketiga, Tiongkok perlu menerapkan

transparansi lebih tinggi dalam skema pendanaan dan proyek infrastruktur untuk mengurangi kekhawatiran terkait risiko utang. Keempat, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam perbedaan respons antara Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia agar pemahaman mengenai dinamika kawasan dapat diperluas dan diperdalam.

## REFERENCES

- Anam, S., & Ristiyanı, R. (2018). Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(2), 217–236. <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2842.217-236>
- Antaranews.com. (24 Januari 2023). BRI Usulan China Tingkatkan Pembangunan Sosial-Ekonomi Negara Pasifik. Diakses 20 November 2024, dari <https://www.antaranews.com/berita/3147461/bri-usulan-china-tingkatkan-pembangunan-sosial-ekonomi-negara-pasifik>
- ASPI (Australian Strategic Policy Institute). (2021). Australia and the Pacific: Rebuilding Strategic Influence. Canberra: ASPI.
- Australian Strategic Policy Institute. (2021). Australia and the Pacific: Rebuilding strategic influence.
- Azis, A. A., & Pratama, M. R. (2023). China's Motives in Providing Foreign Aid in the South Pacific Region. *European Journal of Law and Political Science*.
- Burhanuddin, B. (2015). Dinamika Kawasan Pasifik Barat Daya Dalam Percaturan Global. *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 143-155.
- CSIS (2024). China's power play across the Pacific. Center for Strategic & International Studies (CSIS).
- Dornan, M., & Pryke, J. (2020). Hedging and balancing: Policy responses of Pacific Island states to China's rise. *Asia & the Pacific Policy Studies*.
- He, K. (2020). Theoretical perspectives on soft balancing. Routledge.
- He, K. (2020). Hedging in International Relations: An Analytic Framework. *International Relations of the Asia-Pacific*, 20(3), 375–409.
- Jones, L., & Hameiri, S. (2020). Debunking the myth of 'debt-trap diplomacy'. Chatham House.
- Kim, P. M. (2023). The Risks of China's Ambitions in the South Pacific. Diakses 20 November 2024, dari <https://www.brookings.edu/articles/the-risks-of-chinas-ambitions-in-the-south-pacific/>
- Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton.
- Mulyadi Trisakti, & Zahidi, M. S. (2022). Kepentingan China Meningkatkan Intensitas Kerjasama di Kawasan Pasifik Selatan. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 4(2), 16–29. <https://doi.org/10.29303/ijpss.v4i2.106>

Ogi Nanda Raka Ade Candra Nugraha. (2021). Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi Diplomasi Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Politik Wilayah ASEAN. Jurnal Lemhannas RI, 9(4), 25–42. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.414>

Paul, T. V. (2004). Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century. Stanford: Stanford University Press.

Pangestu, L. G., & Hikmawan, R. (2021). Strategi Indonesia Mewujudkan ASEAN Outlook on Indo-Pasific (AOIP) untuk Menciptakan Stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik. Proyeksi: Jurnal Ilmu. Diakses dari <https://repository.upnvj.ac.id/7467/11/ARTIKEL%20KI.pdf>

Ramadhani, S. N. & Noer, M. (2023). China's influence on Australia's position in the South Pacific: Security and development sector, case study Solomon Islands (2013–2017). Journal of Social Political Sciences, 3(1).

Sanjaya, M. F. A. (2021). Aliansi QUAD dalam upaya menyeimbangkan kekuatan menghadapi China di Indo-Pasifik. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial.

Saraswati, N. M. V. (2019). Menilik Perjanjian Indonesia-Cina dalam Kerangka Belt and Road Initiative (BRI) dalam Perspektif Ketahanan Nasional. Jurnal Lemhannas RI, 7(4), 45-60. Diakses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2961636&val=26383&title=Menilik%20Perjanjian%20Indonesia-Cina%20dalam%20Kerangka%20Belt%20and%20Road%20Initiative%20BRI%20dalam%20Perspektif%20Ketahanan%20Nasional>

Scott, D. (2018). The Indo-Pacific in US Strategy: Responding to Power Shifts. Rising Powers Quarterly, 3(2), 19-33.

Sape, I. (2022). Confucius Institutes and China's soft power in the Pacific. Journal of Contemporary Asia.

Shie, T. H. (2018). Rising Chinese influence in the South Pacific. Asian Survey, 48(2).

Smith, S. (2019). The Free and Open Indo-Pacific Strategy. Journal of Indo-Pacific Affairs.

Swaine, M. (2018). US Strategy in the Indo-Pacific. Journal of Indo-Pacific Affairs. Vinsensio. (2018). Memahami Peningkatan Kehadiran China di Pasifik Selatan: Perspektif Realisme Stratejik. Global: Jurnal Politik Internasional, 20(1), 1-18. <https://doi.org/10.7454/global.v20i1.7716>

Swaine, M. D. (2018). The Free and Open Indo-Pacific Strategy and United States Rebalancing to Asia. Journal of Indo-Pacific Affairs, 1(1), 1–15.

Wene, A. L. (2021). Determinasi Pakta AUKUS terhadap Keamanan Asia Tenggara. Jurnal Asia Pacific Studies, 5(2), 151–163. <https://doi.org/10.33541/japs.v5i2.3990>

Widiaputri, R. S. (2020). Kontestasi Geopolitik Amerika Serikat–China terhadap Keamanan Infrastruktur Maritim di Asia Pasifik. Dalam Geopolitics and International Contemporary Issues in Asia Pacific and Beyond (hlm. 141-156). Diakses dari <http://repository.uki.ac.id/2767/1/EBOOKGEOPOLITICSANDINTERNATIONALCOMMPORARISSUESINASIAPACIFICANDBEYOND.pdf>

- Wallis, J. (2017). Pacific Power? Australia's strategy in the Pacific Islands. *Australian Journal of International Affairs*.
- Wallis, J. & Tibilewicz, C. (2022). The Pacific Islands and Chinese power as presence, influence, and interference. *European Journal of International Security*.
- Walt, S. M. (1987). *The Origins of Alliances*. Ithaca: Cornell University Press.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. New York: McGraw-Hill.
- Ziromwatela, R., & Changfeng, Z. (2016). Africa in China's 'One Belt, One Road' Initiative: A Critical Analysis. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 21(1), 10. <https://doi.org/10.9790/0837-211201102ox>,
- Zhang, D. (2022). China's influence and local perceptions in Pacific Island countries. *Australian Journal of International Affairs*, 76(5).
- Zhang, D. (2023). China's motives and influence in Pacific Island countries. *International Relations of the Asia-Pacific*, 23(1).